

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN
WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PENYANDERAAN DUA WARTAWAN INDONESIA
OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN DI IRAK TAHUN 2005)**

**Oleh
Yoga Budiman, NIM. 1814101028
Program Studi Ilmu Hukum**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui: (1) bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, dan (2) bentuk tanggung jawab negara Irak terhadap penyanderaan wartawan Indonesia, khususnya dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak tahun 2005. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhhususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlindungan yang diterima oleh wartawan di daerah konflik dalam pelaksanaan tugas mereka tidak hanya didapatkan dari negara asal mereka tetapi juga diberikan oleh hukum internasional serta para pihak yang bertikai sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, dan (2) negara Irak melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan terhadap individu yang ada di wilayahnya, pertanggungjawaban penghukuman yang telah dilakukan kelompok Mujahidin yang melakukan tindakan penyanderaan hanya dapat diberikan oleh negara Irak melalui hukum nasionalnya.

Kata Kunci: Wartawan, Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Jenewa 1949

**STATE ACCOUNTABILITY FOR THE HOSTAGE-TAKING OF FOREIGN
JOURNALISTS UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(CASE STUDY OF THE 2005 HOSTAGE-TAKING OF TWO INDONESIAN
JOURNALISTS BY A FACTION OF THE MUJAHIDEEN ARMY IN IRAQ)**

By

Yoga Budiman, NIM. 1814101028

Law Department

Abstract

This study aims to study and find out: (1) a form of legal protection arrangements against foreign journalists held captive in the perspective of International Humanitarian Law, and (2) a form of Iraqi state responsibility for the hostage-taking of Indonesian journalists, particularly in the case of the 2005 hostage-taking of two Indonesian journalists by the Mujahideen Army Faction in Iraq.. The type of research used is normative legal research, with the type of statutory approach, and the case approach. The source of legal materials used is inseparable from the existing rules of international law by specializing in regulations governing International Humanitarian Law. The technique of collecting legal materials carried out is by document study techniques using legal materials that discuss the theories of International Humanitarian Law, especially the 1949 Geneva Conventions. The results showed that: (1) the protection received by journalists in conflict areas in the performance of their duties is not only obtained from their home country but also provided by international law as well as warring parties in accordance with the provisions of International Humanitarian Law, and (2) the Iraqi state through its constitution has provided protection to individuals on its territory, the accountability of the punishments that the Mujahideen group that committed the act of hostage-taking can only be given by the Iraqi state through its national laws.

Keywords: *Journalists, International Humanitarian Law, Geneva Convention 1949*